

**JURNAL**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR MELAWAN HUKUM  
DALAM PERKARA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**(Studi putusan Pengadilan Negeri Marissa nomor : PDS-02/MRS/06/2009)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-SyaratMemperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :**

**TOGA RIZKY ANUGRAH**

**Nim. 105010100111058**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marissa Nomor : PDS-02/MRS/06/2009)**

**Identitas Penulis**

- a. Nama : Toga Rizky Anugrah**
- b. NIM : 105010100111058**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian : 5 bulan**

Disetujui pada tanggal : September 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'I, SH. MS.  
NIP. 194812301973121001

Dr. Bambang Sugiri, SH.MS  
NIP. 195707171984031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MH.  
NIP. 195904061986012001

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR MELAWAN HUKUM  
DALAM PERKARA PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Marissa Nomor : PDS-02/MRS/06/2009)**

Toga Rizky Anugrah, Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS., Dr. Bambang Sugiri,  
SH.MS

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: [Togarizkyanugrah@yahoo.co.id](mailto:Togarizkyanugrah@yahoo.co.id)**

Abstrak

Metode pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis peroleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi Sistematis, dengan menafsirkan dan menghubungkan undang-undang yang terkait.

Dengan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa unsur melawan hukum pada pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam pengertian formil maupun materiil, Namun setelah adanya putusan MK nomor : 003/PUU-IV/2006 maka hanya pengertian perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menafsirkan unsur delik secara melawan hukum dengan menyimpulkan tidak terbuktinya para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melaporkan hasil pengawasan tentang kemajuan fisik pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan fisik yang sebenarnya dilapangan.

**Kata kunci:** Melawan hukum, Korupsi, Barang dan Jasa

**CONSIDERATION JUDGE OF THE ELEMENT AGAINST LAW IN  
CASE OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICE (Study of District  
Court Marissa number: PDS-02 / MRS / 06/2009)**

Toga Rizky Anugrah, Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS., Dr. Bambang Sugiri,  
SH.MS

*Law Faculty Brawijaya University*  
**Email: [Togarizkyanugrah@yahoo.co.id](mailto:Togarizkyanugrah@yahoo.co.id)**  
*Abstract*

*The method used is a normative juridical, with the approach of legislation (statute approach) and approach the case (case approach). Primary legal materials, secondary and tertiary authors obtained will be analyzed using the techniques of interpretation Systematic analysis, by interpreting and connecting the relevant legislation.*

*With the results of the study authors to obtain an answer, that the element of unlawfulness in Article 2 of Law No. 31 year 1999 on Eradication of Corruption, which was renewed by Act No. 20 of 2001 in terms of formal and substantive, but after the decision of the Court numbers: 003 / PUU-IV / 2006, the only sense tort in any formal sense. Meanwhile, in consideration of the District Court Judges have made a mistake in interpreting the rules of evidence apply the elements of the offense is against the law to conclude no good evidence that the defendant committed an unlawful act, but based on legal facts have obtained evidence in court of evidence in the form of expert testimony and the testimony of witnesses who show an unlawful act committed by the defendant in a report on the results of monitoring the physical progress of work Simple Citizens Housing Development Project KAT incorrectly and does not match the reality / actual physical state of the field.*

***Keywords:*** *Against the law, Corruption, Goods and Services*

## A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas, hingga menjalar dari semua aspek pemerintah sampai aparat penegak hukum. Korupsi bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa, yaitu dengan menggunakan cara-cara khusus.

Dalam cara pandang sosiologis korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga model. Pertama, *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*, artinya korupsi yang memegang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan.<sup>1</sup> Susan Rose-Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan penjelasan sosiologis diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang leluasa dan mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi khususnya para penyelenggara Negara dalam berbagai lapisan, serta masyarakat secara umum yang mempunyai kewenangan khusus yang diberikan oleh Negara.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi korupsi yang merupakan extra *Ordinary crime* (kejahatan luar biasa) Negara melalui Lembaga Eksekutif dan Legislatif membentuk suatu peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dengan sejalannya perkembangan dan mengalami perluasan inti delik korupsi. Kasus tindak pidana korupsi tidak lagi mengacu pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan telah dibuat Undang-Undang tersendiri yang secara khusus menangani kasus korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum, atau biasa disebut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang selanjutnya disingkat dengan UUPTPK.

Unsur delik pada korupsi terjadi bukan hanya karena penyalahgunaan wewenang saja sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun juga karena ada perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

---

<sup>1</sup> KPHA.Tjandra Sridjaja Pradjonggo, **Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi**, Indonesia lawyer club, Surabaya, hlm 1

Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penyalahgunaan wewenang terjadi terhadap siapapun yang mempunyai wewenang. Pihak yang memiliki wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri maupun swasta. Pejabat Negara maupun swasta mempunyai kewenangan-kewenangan yang diberikan atau ditunjuk oleh Negara untuk mengelola pembangunan nasional dalam segala aspek, seperti pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pelayanan publik yang lain. Namun di sisi lain, kewenangan yang dimiliki tersebut tidak selalu berdampak positif, seringkali kita melihat secara nyata banyak penyelewengan atas keuangan Negara yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan pelayanan publik tetapi malah dipergunakan demi kepentingan dan keuntungan sendiri, salah satunya ialah berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Permasalahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terjadi di Provinsi Gorontalo, kasus ini bermula pada tahun 2007 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi dana untuk pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari dana Dekonsentrasi (APBN) berdasarkan DIPA No. 0917.0/0/027-03.1/XXVI/2007 Tanggal 31 Desember 2006, berupa Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek tersebut PT. Van Des Thio bertindak selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 27/7204/03/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helmi Laya selaku Kuasa Direktur PT. Van Des Thio dengan Abdul Thalib Dilapanga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.203.103.000,00 (satu milyar dua ratus tiga juta seratus tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dan telah dilakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 159 hari kalender berdasarkan Addendum Kontrak I Nomor : 01/ADD/7204/03/XI/2007 tanggal 29 November 2007 serta perubahan harga/nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 1.323.280.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Addendum Kontrak 02 Nomor : 02/ADD/7204/XII/2007.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebut ditetapkan CV. Ilobulea sebagai konsultan pengawas berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun Anggaran 2007 Nomor : 37.a/7204/03/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan dibuatlah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan/Supervisi (Kontrak) Nomor : 35.a/7204/03/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007 antara terdakwa I Ir. Achmad Bagulu selaku Direktur CV. Ilobulea dengan Abdul Thalib Dilapanga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan terdakwa I Ir. Achmad Bagulu menunjuk terdakwa II Ir. Syarif M. Usman untuk bertindak sebagai Pimpinan Teknik CV. Ilobulea dan terdakwa III Suharto Katili sebagai pengawas lapangan CV. Ilobulea. Sebagai konsultan pengawas dalam

pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), para terdakwa (Ir. Achmad Bagulu, Ir. Syarif M, Suharto Katili) mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengawasan terhadap Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dilaksanakan oleh Helmi Laya selaku Kuasa Direktur PT. Van Des Thio dan selanjutnya melaporkan hasil pengawasannya dalam bentuk laporan kemajuan pekerjaan secara periodik berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan kepada pihak pengguna barang/jasa (Dinas Sosial Provinsi Gorontalo) dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran pengawasan yang dihasilkannya sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 dan 3 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan/Supervisi (Kontrak) Nomor : 35.a/7204/03/VII/2007 Tanggal 10 Juli 2007 dan ketentuan dalam lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C ke 2 Huruf a angka 11 huruf b ayat (3) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Helmi Laya selaku kuasa Direktur PT. Van Des Thio sesuai dengan kualitas dan volume dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (kontrak) Nomor : 27/7204/03/VII/2007

Dari kasus tersebut diatas, penuntut umum mendakwakan terdakwa secara primer dan subsider, pada dakwaan primer terdakwa telah terbukti melanggar Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan pada dakwaan subsider terdakwa telah melanggar perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Namun dalam putusan, majelis hakim Negeri Marissa berpendapat lain terhadap dakwaan yang ditujukan oleh jaksa kepada terdakwa, sehingga terdakwa di bebaskan dari dakwaan. Atas putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, Kemudian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan membatalkan putusan pengadilan Negeri Marissa. Bertolak dari masalah di atas maka menjadi kajian yang menarik untuk diangkat menjadi permasalahan dalam skripsi yang berjudul *“Pertimbangan hakim terhadap unsur melawan hukum dalam perkara pengadaan barang dan jasa (studi putusan pengadilan negeri marissa nomor :PDS-02/MRS/06/2009).*

## **B. Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri marissa membebaskan terdakwa atas dasar tidak melakukan unsur perbuatan melawan hukum ?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan atas nama terdakwa I Ir. ACMAD BAGULU, terdakwa II Ir. M. USMAN dan terdakwa III SUHARTO KATILI.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan berusaha mengkaji peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut sesuai dengan tema penelitian, penulis mengkaji unsur melawan hukum dalam pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, yaitu pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sedangkan, Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang terjadi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri hingga putusan Mahkamah Agung.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-perundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga membantu menganalisa dan memudahkan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

#### 4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum



Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier yang telah dikumpulkan berdasarkan kesinambungan dan kesesuaian dengan topik penelitian, baik yang diperoleh dari studi literature maupun aturan perundang-undangan, serta melalui media internet.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Dari pencarian ini diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasional antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuai antara peraturan hukum, dan lain-lain. Interpretasi Sistematis akan digunakan di dalam penelitian ini, yaitu dengan cara menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain.

### D. Pembahasan

#### 1) Korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 yang rumusan selengkapannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

Dalam ketentuan ini jika kata “dapat” sebelum frasa “merugikan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>2</sup> Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

##### a. Perbuatannya

- 1) Memperkaya diri sendiri

---

<sup>2</sup>Amiruddin, **Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) dalam tindak pidana Korupsi**, Genta press, Yogyakarta 2012, hlm 41.

- 2) Memperkaya orang lain
- 3) Memperkaya suatu korporasi
- b. Dengan cara melawan hukum
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut berasal dari rumusan lama dalam Pasal 1 Ayat (1) sub a UU No. 3/1971, Namun diadakan penyederhanaan dengan membuang unsur/kalimat "yang secara langsung atau tidak langsung" (dalam konteks merugikan keuangan atau perekonomian negara). Selain itu juga, tidak lagi mencantumkan unsur kesalahan berupa "diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sehingga di dalam rumusan yang baru ini tidak terdapat lagi unsur subjektif kesalahan, semua unsur bersifat objektif. Perubahan seperti itu, menyebabkan cakupan rumusan yang sekarang menjadi bertambah luas dan pengertiannya bertambah abstrak.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 yang berupa rumusan paling abstrak di antara rumusan-rumusan lainnya, oleh karena itu cakupannya sangat luas. Dengan luasnya rumusan itu, maka sangat banyak perbuatan yang dapat masuk ke dalam rumusan ini, sehingga banyak penafsiran yang beragam tentang pengertian korupsi dalam penerapannya pada kasus-kasus konkret yang terjadi. Segi positif dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga lebih mudah menjerat si pembuat. Selain itu, rumusan abstrak seperti ini lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat melalui penafsiran hakim. Namun, segi negatifnya mengurangi kepastian hukum akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini secara serampangan. Luasnya perumusan ini telah terbukti dalam praktik, Pasal 2 dan Pasal 3 itu selalu dicantumkan dalam surat dakwaan perkara korupsi, bahkan sering menjadi dakwaan primair dan subsidairnya, atau dakwaan pertama dan kedua.

#### A. Unsur Perbuatan Memperkaya Diri

Dalam KUHP ada unsur "menguntungkan diri" seperti dalam Pasal 368, 369, 378. Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP yang telah disebutkan, pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada". Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya yang mengatakan bahwa :

*"sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau aranglain" (Lamintang (iii), 1979:276).*

Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan di situ merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandiato, 1997:240). Oleh karena itu dari

sudut bahasa/ harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub a dari UU nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut:

*"Perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi"*

Apabila kalimat tersebut diteliti dengan saksama (dalam mencari arti unsur memperkaya itu perlu dihubungkan dengan norma Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan "sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan si pembuat lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan (tidak seimbang) kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan si pembuat. Berarti dari perbuatan memperkaya, si pembuat memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada sumber yang menghasilkan kekayaan itu. Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan, perolehan kekayaan yang melebihi sumber kekayaan yang sudah ada, artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan, bahwa ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu:

- Pertama, dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- Kedua, sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
- Ketiga, apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formil)

maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).

- Keempat, apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaannya tersebut.
- Kelima, apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka sipembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri yang terakhir tidaklah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat.

Dalam kerugian negara yang menjadi unsur Pasal 2 ini sekedar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian dalam jumlah yang tertentu. Dalam hal dapat mendatangkan kerugian negara cukuplah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa menurut pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dari perbuatan memperkaya yang diperbuat oleh si pelaku dapat mendatangkan kerugian bagi negara. Namun tidak semua (dapat) merugikan keuangan negara serta merta menjadi tindak pidana korupsi. Masih diperlukan syarat lain, antara lain terdapatnya unsur sifat melawan hukum. Dapat merugikan keuangan negara, artinya dari wujud perbuatan memperkaya tersebut dapat dipikirkan oleh logika/akal potensial dapat merugikan keuangan negara. Jadi, tidak harus terbukti benar-benar ada akibat kerugian keuangan negara yang nyata. Dapat atau potensial menimbulkan kerugian negara tersebut terletak pada keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipikirkan oleh setiap orang normal bahwa bila keadaan tersebut timbul, maka dengan timbulnya keadaan tersebut, potensial menimbulkan kerugian negara.

Untuk membuktikan "dapat" merugikan keuangan negara, jaksa penuntut umum setidaknya-tidaknya harus mampu membuktikan adanya suatu keadaan tertentu pada saat perbuatan memperkaya diwujudkan. Bahwa keadaan itu dapat menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Setiap orang mampu memikirkan, bahwa dengan timbulnya keadaan yang demikian dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila jaksa sama sekali tidak mampu membuktikan keadaan tersebut, maka tidak mungkin dapat menyimpulkan bahwa dakwaan pelanggaran Pasal 2 telah terbukti. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, meskipun kerugian nyata belum ada, angka potensialnya (dapatnya) rupiah merugikan keuangan negara juga patut ditemukan. Pasal 1 angka 22 tersebut berbunyi

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*

Dalam praktik, selalu ada kerugian negara akibat tindak pidana korupsi Pasal 2, walaupun sebenarnya untuk terjadi korupsi Pasal 2 kerugian negara tidak perlu nyata-nyata sudah timbul, karena perbuatan memperkaya diri baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara.

#### B. Unsur Melawan Hukum

melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang memang telah lazim dibahasa Indonesia dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni :

- 1) Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan tetapi
- 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut Pasal 2 telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil. Penjelasan seperti ini dapat mempermudah pembuktian tentang keberadaan sifat tercelanya dari suatu perbuatan yang nyata-nyata memperkaya. Apabila suatu perbuatan tertentu sebagai wujud dari memperkaya yang tidak terlarang menurut hukum tertulis, tetapi apabila diukur dari sudut nilai-nilai misalnya keadilan, kepatutan yang hidup di masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, maka celaan menurut nilai masyarakat itu juga termasuk dalam pengertian sifat melawan hukum atas perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tersebut. Tentang sifat melawan hukum Pasal 2 Ayat (1), dijelaskan oleh penjelasannya sebagai berikut.

*"Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil*

*maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".*

Dari penjelasan yang demikian itu, dapatlah disimpulkan bahwa:

- Pertama, menerangkan bahwa ada 2 (dua) macam sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri (sendiri, orang lain atau suatu badan), yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.
- Kedua, menjelaskan tentang arti melawan hukum materiil, yaitu sifat tercela (dalam perbuatan memperkaya) yang didasarkan pada rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Kiranya inilah yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil positif dalam suatu perbuatan yang secara formil menjadi unsur tindak pidana.

Dalam kenyataannya, sifat delik formil dan delik materiil adalah berbeda. Terhadap delik yang dirumuskan secara formil, menitik beratkan pada pelaku, sedang delik yang dirumuskan secara materiil, menitik beratkan pada akibatnya.<sup>3</sup> Kini penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sifat melawan hukum yang dimaksud oleh MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, tiada lain adalah sifat melawan hukum materiil positif, dan bukan sifat melawan hukum formil positif.

Apabila hakim hendak menerapkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU PTPK seharusnya memperhatikan sungguh-sungguh putusan MK No. 003/PUU-IV/2006. Dengan kata lain, dalam menerapkan ketentuan pasal 2 ayat 1 tidak boleh mengabaikan atau melanggar putusan MK tersebut. Aparat hukum yang masih menerapkan konsep melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi akan menimbulkan sebuah ketidak pastian hukum dan *abuse of power*. Oleh sebab itu, maka putusan MK tersebut harus atau wajib ditaati oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam praktik kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana layaknya hidup dalam Negara Hukum.<sup>4</sup>

Pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar suatu peraturan dalam semua bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lainnya, telah mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Akan tetapi sifat melawan hukum perdata atau tata usaha negara seperti itu tidak

---

<sup>3</sup> Amiruddin, **Unsur MELawan Hukum (Wederrechtelijk) dalam tindak pidana Korupsi**, Genta press, Yogyakarta 2012, hlm 41.

<sup>4</sup> Amiruddin, **Unsur MELawan Hukum (Wederrechtelijk) dalam tindak pidana Korupsi**, Genta press, Yogyakarta 2012, hlm 108.

serta merta merupakan atau menjadi sifat melawan hukum pidana, khususnya korupsi. Untuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formil) khususnya korupsi Pasal 2 dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;
- 2) Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara;
- 3) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/ logika/ potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan
- 4) Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

Empat syarat adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 tersebut. sifatnya kumulatif, harus terpenuhi semuanya. Jika terpenuhi, maka yang semula sifat melawan hukum perdata atau tata usaha negara (kesalahan administrasi) berubah sifat, menjadi sifat melawan hukum pidana korupsi. Dengan demikian kepada si pembuatnya dapat dipersalahkan dan dibebani tanggung jawab pidana dengan menjatuhkan suatu sanksi pidana.

#### C. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan negara atau menimbulkan kerugian perekonomian negara, dalam UUTPK baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 2. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memerhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Apa yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" atau perekonomian negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal 2. BPK menggunakan 4 kriteria adanya kerugian negara, ialah:

- a) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan & pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara).
- b) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dalam Pasal 2 dan 3 UUTPK, disebut "dapat" menimbulkan kerugian, kalimat itu juga harus diartikan potensi merugikan keuangan tersebut dapat dihitung kepastian angkanya. Jadi dibuktikan adanya potensi menimbulkan kerugian keuangan negara, dan dibuktikan juga berapa angka yang pasti tentang potensi kerugian tersebut. Dari sudut kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tersebut perlu diperhatikan dalam praktik penanganan perkara korupsi.

Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang perlu merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Kini apakah yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dalam Pasal 2 Ayat 1 ini.

Mengenai kedua unsur itu pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya (otentik) di dalam penjelasan umum UU No. 31/1999. Penjelasan umum yang dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perlu diketahui bahwa "sifat uang negara" yang melekat pada sejumlah uang, dalam keadaan-keadaan



**Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam Putusan Nomor: PDS-02/MRS/06/2009 terhadap unsur perbuatan melawan hukum.**

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara No: PDS-02/MRS/06/2009 atas perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dengan terdakwa Ir. ACMAD BAGULU, Ir. M. USMAN dan SUHARTO KATILI yang amar putusannya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Ir. ACMAD BAGULU, terdakwa II Ir. M. USMAN dan terdakwa III SUHARTO KATILI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa I Ir. ACMAD BAGULU, terdakwa II Ir. M. USMAN dan terdakwa III SUHARTO KATILI oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar 60 macam barang bukti dikembalikan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan selanjutnya 4 barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Putusan bebas ini dijatuhkan oleh majelis hakim karena majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum, Sehingga para terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa setelah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Marissa dan memori kasasi jaksa penuntut umum, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi jaksa/penuntut umum dan menyatakan terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana 4 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00, subsidair selama 12 bulan kurungan.

A. Kasus Posisi

B. Keterangan saksi

Bahwa di dalam berkas perkara terdapat 13 orang saksi dan 2 ahli, Masing-masing saksi dan ahli yang hadir di persidangan.

C. Surat

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan beberapa dokumen yang dijadikan bukti dalam persidangan berupa surat sebanyak

64 yang telah di sita dan juga melampirkan bukti surat dalam berkas perkara

D. Keterangan Terdakwa

E. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur “ Secara melawan hukum “

Untuk membuktikan unsur melawan hukum, jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi dan ahli sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang pada dasarnya para saksi dan ahli menerangkan bahwa terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Helmi laya selaku kuasa Direktur PT. Van Des Thio sesuai dengan kualitas dan volume, Kemudian para terdakwa secara nyata mengetahui dan tetap melaporkan hasil pengawasan tentang kemajuan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh Helmi laya seolah-olah sudah sesuai dengan kualitas dan volume sesuai dalam surat perjanjian pengadaan barang dan jasa (kontrak).

Dalam hal penilaian hasil pekerjaan, majelis hakim menemukan fakta yang berbeda antara penilaian yang dilakukan antara ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan para terdakwa.

## **2. Analisis Penulis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam Putusan Nomor: PDS-02/MRS/06/2009 terhadap unsur perbuatan melawan hukum.**

Setelah melalui tahapan upaya hukum pada tingkat kasasi ke Mahkamah Konstitusi, kiranya menarik dikaji atau dianalisa mengenai pertimbangan Majelis hakim Negeri Marissa terhadap unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

- Majielis Hakim pengadilan Negeri Marissa telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam uraian pembuktian unsur secara melawan hukum tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP secara utuh dan menyeluruh. Adapun keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut :

- a) Keteranagan saksi ASRIN PAKAYA
- b) Keteranagan Saksi Sukriyani Hilimi
- c) Keteranagan Saksi jaqob Sedi
- d) Keteranagan Saksi IRAMSYAH DJABU, BE
- e) Keteranagan Saksi Dekon Palowa
- f) Keteranagan Ahli ANTON KAHARU.ST.MT

Bahwa dengan tidak dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti yang sah di persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHAP telah mengakibatkan Majelis hakim Negeri Marissa melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur delik secara melawan hukum dengan menyimpulkan tidak terbuktinya para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan ahli Anton keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam melaporkan hasil pengawasan tentang kemajuan fisik pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan fisik yang sebenarnya dilaporkan

2. Majelis Hakim pengadilan Negeri Marissa dalam mempertimbangkan uraian mengenai hal yang berkaitan dengan fisik bangunan dan kualitas kayu mengambil keterangan saksi ad charge, yaitu saksi Ikra podungge dan Thalib Hunowu sebagai fakta hukum. Berikut ini pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan fisik bangunan :

“Majelis hakim berkesimpulan bahwa materi dakwaan yang menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi/lantai pada pembangunan 1 unit masjid, 1 buah balai sosial, 2 buah rumah petugas dan 100 unit rumah, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, dengan demikian tidak terdapat suatu unsur perbuatan melawan hukum terhadap item pekerjaan urugan pasir dibawah pondasi”.

Dalam hal mengenai kualitas kayu yang dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

“Majelis hakim berkesimpulan bahwa uraian dakwaan jaksa penuntut umum dalam hal pengujian kualitas kayu, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, dengan demikian maka tidak terdapat pula suatu unsur perbuatan melawan hukum dalam item pekerjaan Kusen pintu, jendela dan ventilasi pada pembangunan 1 unit masjid, 1 buah balai social, 2 buah rumah petugas dan 100 unit rumah tersebut”.

Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang pada pokoknya berpendapat :

“Bahwa dalam kontrak tidak ditentukan penggunaan kualitas kayu untuk pekerjaan papan, kusen, daun jendela,pintu”.

Bahwa dalam hal pertimbangan fisik bangunan Majelis hakim telah melakukan kekeliruan dengan menyimpulkan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, padahal

berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan ahli Anton dan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa dalam memahami kontrak Majelis Hakim telah salah memahami kontrak, karena yang menjadi bagian dari kontrak tidak hanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana (Helmi Laya) akan tetapi seluruh lampiran yang ada dalam kontrak merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan termasuk Daftar Analisa Harga Satuan.

Bahwa Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didasarkan pada analisa Harga Satuan dan dalam Daftar Analisa Harga Satuan telah ditentukan penggunaan kayu kelas II, daun pintu papan ditentukan papan kelas II, pintu panel ditentukan kayu kelas I, pintu tripleks rangkap ditentukan kayu kelas II, ventilasi jalusi papan ditentukan kayu kelas II, kuda-kuda ditentukan kayu kelas II, gording ditentukan kayu kelas II, lisplank papan ditentukan kayu kelas II dan rangka dinding tripleks ditentukan kayu kelas II sehingga dengan demikian jelas bahwa penggunaan kayu dalam proyek tersebut haruslah menggunakan kelas II.

Untuk mengenai penentuan kelas kayu majelis hakim berpendapat harus dilakukan uji laboratorium, terhadap hal tersebut penulis tidak sependapat karena untuk mengetahui kelas kayu berdasarkan teknik sipil dan bangunan terdapat banyak cara untuk mengetahui jenis dan kelas kayu tanpa harus melakukan uji laboraterium, diantaranya dengan melihat dari keadaan kayu, yang salah satunya adalah meneliti adanya rayap pada kayu.

3. Bahwa majelis hakim pengadilan Negeri Marissa telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai ketentuan pasal 186 KUHAP jo. Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan”.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Marisa dalam uraian pembuktian unsur secara melawan hukum majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli An. Anton Kaharu, ST.MT sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang teknik sipil bangunan, padahal dalam persidangan, Ahli An. Anton Kaharu, ST.MT merupakan satu-satunya orang yang memberikan keterangan di persidangan yang keterangannya memenuhi kualifikasi sebagai ahli sesuai dengan pasal 186 KUHAP Jo. pasal 1 angka 28 KUHAP, dan justru majelis hakim dalam mempertimbangkan uraian mengenai hal yang berkaitan dengan fisik bangunan mengambil keterangan saksi ad charge, yaitu saksi Ikra

Podungge dan Thalib Hunowu sebagai fakta hukum yang jelas-jelas tidak memiliki keahlian khusus dan bahkan keteranagnnya patut dipertanyakan mengingat ikra padungge merupakan salah satu pekerja dalam proyek tersebut yang mempunyai hubungan kerja dengan Helmi Laya.

4. Terhadap pekerjaan Grendel dan tarikan pintu dan jendela Majelis hakim berpendapat:

“Pekerjaan tersebut telah diadakan alatnya tetapi belum dipasang sehingga dianggap sudah dilaksanakan”.

Bahwa dalam hal ini menurut penulis Majelis Hakim telah salah karena dalam ketentuan kontrak mensyaratkan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan hingga terpasang dan hal tersebut didasarkan pada adanya upah pekerja untuk pemasangan Grendel tarikan pintu dan jendela sehingga apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan hanya berupa pengadaan alat-alatnya saja tanpa dipasangkan, maka biaya untuk upah pekerja tersebut haruslah tidak diperhitungkan.

Dalam hal ini penulis memberikan pendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melaporkan hasil pengawasan tentang kemajuan fisik pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan fisik yang sebenarnya dilapangan.

Perbuatan ini telah melanggar ketentuan pidana korupsi dalam delik formil yang tertuang/dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 UUPTPK.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur Melawan hukum pada pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam arti formil maupun materiil, Namun setelah adanya putusan MK nomor : 003/PUU-IV/2006 maka hanya pengertian perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil.
2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marissa telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan hukum pembuktian mengenai unsur delik secara melawan hukum dengan menyimpulkan tidak terbuktinya para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum,

padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melaporkan hasil pengawasan tentang kemajuan fisik pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT yang secara tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dilaporkan.

## **2. SARAN**

Adapun saran terhadap kasus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

1. Dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam lingkup pemerintahan, seringkali menimbulkan korupsi baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Seyogyanya hakim dalam merumuskan suatu putusan harus berdasar pada fakta-fakta hukum dalam persidangan dan tidak mengesampingkan alat bukti keterangan ahli maupun keterangan saksi, sehingga dapat merumuskan putusan yang demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, **Hukum Pidana**, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Yogyakarta, Liberty, 2003
- Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York: Holt & Winston, 1979
- Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia, 2011.
- Komariah Emong Sapardjaja, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Alumni, 2002
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Leden Marpaung, **Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bandung, Mandar Maju, 2010
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Jakarta, Erlangga, 1984
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Prenade media Group, 2011
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

- Riduan Syahrani, **Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1996
- Tambah Sembiring, **Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri**, Medan, USU Press, 1993.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, **Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi**, Indonesia lawyer club, Surabaya, hlm 1
- Valerie J.L Kriekhoff, **Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telah Awal**, majalah Era Hukum, Vol.6 , 1997.
- W.J.S. Poerwadamita, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit: Balai Pustaka, 1976
- Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

#### **c. Kamus**

- S. Wojowasito-W.J.S. Poewardaminta, **Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris**, Penerbit: Hasta, Bandung.



Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern**, Penerbit  
pustaka Amani, Jakarta